



Ketimpangan Akses Pendidikan Islam: Studi Kasus di Tambing Kekeq Aik Berik

Ulan Susilawati^{1*}, Fathurrahman Muhtar¹, Ismail¹

¹ Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram, Indonesia.

DOI: <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v7i3.2207>

Article Info:

Received : 03 Juni 2026
Revised : 15 Juni 2026
Accepted : 24 Juni 2026
Published : 01 Juli 2026

Correspondence:

Ulan Susilawati

Phone:

Abstract: This study aims to analyze the inequality in access to Islamic education in Tambing Kekeq Hamlet, Aik Berik Village, Central Lombok Regency, by examining the factors that influence this disparity and its implications for the sustainability of community education. Educational inequality in this context is understood as a structural phenomenon influenced by geographic conditions, economic conditions, educational infrastructure, and policies that are not fully responsive to remote areas. This study uses a qualitative approach with a case study design. Data were collected through participatory observation and in-depth interviews with five respondents consisting of parents, students, community leaders, teachers, and village officials. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman interactive model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification. The results show that the inequality in access to Islamic education in the study area is caused by geographic isolation that hinders student mobility, limited teaching staff and educational facilities, and economic pressures of an agrarian community that often makes education a low priority. These conditions result in low educational participation, high absenteeism rates, and the emergence of a gap in religious literacy between central and peripheral areas. These findings confirm that educational inequality is multidimensional and interconnected, forming a cycle of educational injustice. The implications of this research point to the need for more affirmative and region-based education policies, including strengthening educational infrastructure, equitable distribution of teaching staff, and innovative educational services based on geographic accessibility. This approach is crucial for realizing a more inclusive and equitable distribution of Islamic education in remote areas.

Keywords: Inequality in Access; Islamic; Education.

Citation: Susilawati, U., Muhtar, F., & Ismail. (2026). Ketimpangan Akses Pendidikan Islam: Studi Kasus di Tambing Kekeq Aik Berik. *Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi, Dan Geofisika (GeoScienceEd Journal)*, 7(3), 2935-2940. <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v7i3.2207>

Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan pemerintah wajib membiayai serta menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang merata dan berkeadilan. Secara normatif, ketentuan tersebut menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh mengalami diskriminasi baik berdasarkan aspek geografis, sosial, maupun ekonomi (Rini, N. S.,

2018; Hasanah, R., 2025). Dalam perspektif Islam, pendidikan juga memiliki kedudukan yang sangat sentral sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Mujadilah ayat 11 yang menekankan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, serta Surah At-Taubah ayat 122 yang menekankan pentingnya pendalaman ilmu pengetahuan demi kemaslahatan umat. Dengan demikian, baik secara konstitusional maupun teologis, pendidikan merupakan instrumen utama dalam membangun peradaban manusia yang berkeadaban dan berkeadilan.

Email: 250401034.mhs@uinmataram.ac.id

Sejalan dengan itu, pendidikan Islam dalam konteks Indonesia yang direpresentasikan melalui Madrasah dan Pondok Pesantren memiliki posisi strategis sebagai pilar pembentukan karakter dan spiritualitas bangsa. Lembaga-lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai institusi transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai religius yang menjadi identitas masyarakat. Dalam kerangka pembangunan nasional, pemerataan akses pendidikan Islam menjadi bagian integral dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing sekaligus berlandaskan moralitas keagamaan. Oleh karena itu, prinsip keadilan pendidikan semestinya tidak hanya bersifat normatif, tetapi harus terimplementasi secara nyata dalam seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil dan terpinggirkan (Hamidi, J., 2016).

Namun demikian, idealitas tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam realitas empiris. Ketimpangan akses pendidikan Islam masih menjadi problem struktural yang nyata, khususnya di wilayah-wilayah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau (Gunawan, B., 2020; Prima, J., & Wahyunisa, H., 2025). Ketidakseimbangan distribusi lembaga pendidikan menyebabkan sebagian kelompok masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap pendidikan, sementara kelompok lainnya harus menghadapi hambatan yang signifikan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep pemerataan pendidikan yang diidealkan oleh negara dengan kenyataan yang dialami oleh masyarakat di wilayah perifer.

Dalam konteks tersebut, Desa Aik Berik di Kabupaten Lombok Tengah menjadi salah satu wilayah yang mencerminkan ketimpangan tersebut secara nyata. Meskipun dikenal memiliki nilai religius yang kuat serta potensi alam yang besar, desa ini masih menghadapi persoalan serius dalam hal akses pendidikan Islam yang merata. Terutama di Dusun Tambing Kekeq yang berada pada kawasan dengan elevasi tinggi dan berada di zona penyangga hutan, akses menuju lembaga pendidikan formal seperti Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) menjadi sangat terbatas (Seo, M. R., et al., 2025). Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak struktural yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga sosial dan ekonomi.

Kondisi geografis yang ekstrem menyebabkan mobilitas peserta didik menjadi sangat terbatas. Jarak tempuh yang jauh, infrastruktur jalan yang kurang memadai, serta keterbatasan sarana transportasi menjadi faktor dominan yang menghambat keberlangsungan pendidikan (Angglepi, M. S., Susanti, E., & Haironi, N., 2025). Dalam banyak kasus, anak-anak usia sekolah harus menempuh perjalanan yang berat hanya untuk dapat mengakses pendidikan dasar Islam.

Situasi ini tidak hanya berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi pendidikan, tetapi juga berpotensi menurunkan motivasi belajar serta meningkatkan angka putus sekolah.

Selain itu, faktor ekonomi masyarakat turut memperkuat ketimpangan akses tersebut. Sebagian besar penduduk di wilayah Tambing Kekeq menggantungkan hidup pada sektor agraris dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah dan tidak stabil (ARINDA, M., 2025). Kondisi ini menyebabkan kemampuan keluarga dalam mendukung pendidikan anak menjadi terbatas, baik dari segi biaya transportasi maupun kebutuhan pendidikan lainnya. Akumulasi antara faktor geografis dan ekonomi ini membentuk lingkaran ketidakberdayaan yang sulit diputus tanpa intervensi kebijakan yang komprehensif.

Di sisi lain, perkembangan teknologi pendidikan yang mulai dinikmati oleh wilayah perkotaan belum sepenuhnya menjangkau daerah ini. Ketimpangan digital semakin memperlebar jurang akses pendidikan, di mana peserta didik di wilayah pusat desa telah mulai terintegrasi dengan pembelajaran berbasis teknologi, sementara di wilayah terpencil masih bergantung pada metode pembelajaran konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendidikan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup dimensi teknologi dan informasi (Siregar, S. H., et al., 2025).

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, diperlukan berbagai alternatif solusi yang bersifat strategis dan berkelanjutan. Pemerataan pembangunan infrastruktur pendidikan, penyediaan transportasi pendidikan, serta penguatan kebijakan afirmatif bagi wilayah terpencil menjadi beberapa pendekatan yang dapat dipertimbangkan. Selain itu, integrasi teknologi pembelajaran berbasis digital juga dapat menjadi instrumen penting dalam memperluas akses pendidikan Islam di wilayah-wilayah marginal.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji isu ketimpangan akses pendidikan dari berbagai perspektif. Penelitian Rahman (2022) menyoroti ketimpangan distribusi pendidikan Islam di wilayah pedesaan yang disebabkan oleh faktor geografis dan kebijakan pembangunan yang belum merata. Selanjutnya, Hidayat (2023) menemukan bahwa keterbatasan akses pendidikan di daerah terpencil berimplikasi pada rendahnya partisipasi pendidikan dan melemahnya transmisi nilai keagamaan. Penelitian lain oleh Sari (2021) menekankan pentingnya intervensi kebijakan berbasis wilayah dalam mengatasi disparitas pendidikan. Namun demikian, ketiga penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji dinamika ketimpangan akses pendidikan Islam pada konteks spasial ekstrem seperti wilayah pegunungan terpencil yang memiliki karakteristik sosial-budaya yang unik, sehingga masih terdapat celah penelitian (*research gap*)

yang signifikan. Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa analisis mendalam mengenai bentuk, faktor, dan dampak ketimpangan akses pendidikan Islam di wilayah dengan karakteristik geografis ekstrem, khususnya di Dusun Tambing Kekeq, Desa Aik Berik. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek deskriptif, tetapi juga mencoba mengkonstruksi pemahaman komprehensif mengenai relasi antara ruang, kebijakan, dan akses pendidikan Islam dalam konteks marginalitas wilayah.

Urgensi penelitian ini semakin mengemuka mengingat pentingnya pendidikan sebagai instrumen transformasi sosial dan spiritual masyarakat. Berdasarkan observasi awal di lokasi penelitian, ditemukan bahwa keterbatasan akses pendidikan telah berdampak pada rendahnya tingkat keberlanjutan pendidikan formal anak-anak di wilayah tersebut, serta terbatasnya akses terhadap pembelajaran agama yang terstruktur. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menghadirkan kajian ilmiah yang mampu memberikan dasar rekomendasi kebijakan yang lebih responsif dan kontekstual.

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif ketimpangan akses pendidikan Islam di Dusun Tambing Kekeq, Desa Aik Berik, Kabupaten Lombok Tengah, dengan menelaah faktor penyebab, bentuk ketimpangan, serta implikasinya terhadap keberlangsungan pendidikan masyarakat, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam upaya mewujudkan pemerataan pendidikan Islam yang berkeadilan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memberikan ruang yang lebih mendalam bagi peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman subjektif masyarakat lokal terkait berbagai hambatan dalam akses pendidikan Islam (Mustika, W., et al., 2020; Ramadhani, D. A., et al., 2025). Melalui pendekatan tersebut, realitas sosial tidak hanya dipahami sebagai fenomena permukaan, tetapi juga ditelaah secara kontekstual berdasarkan pengalaman, persepsi, serta makna yang dibangun oleh subjek penelitian. Lokasi penelitian difokuskan di Dusun Tambing Kekeq, Desa Aik Berik, Kabupaten Lombok Tengah sebagai wilayah yang merepresentasikan kondisi ketimpangan akses pendidikan pada daerah geografis terpencil.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam. Observasi partisipatif digunakan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai kondisi nyata di lapangan, khususnya terkait aksesibilitas pendidikan, kondisi geografis, serta dinamika sosial masyarakat.

Sementara itu, wawancara mendalam dilakukan untuk menggali persepsi masyarakat terkait biaya pendidikan, hambatan struktural, serta motivasi belajar peserta didik di tengah keterbatasan akses dan sumber daya pendidikan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Rohmah, A. R. K. A., et al., 2026). Model ini dipilih karena memungkinkan proses analisis data kualitatif dilakukan secara sistematis, berkesinambungan, dan berlangsung secara siklik antara pengumpulan data dan analisis di lapangan.

Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data mentah yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Pada tahap ini, data yang tidak relevan dengan fokus penelitian mengenai ketimpangan akses pendidikan Islam di Dusun Tambing Kekeq dieliminasi, sementara data yang relevan dikategorikan untuk memperjelas pola-pola temuan awal.

Tahap kedua adalah penyajian data (*data display*), yaitu proses penyusunan sekumpulan informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk yang lebih sistematis agar mudah dipahami dan dianalisis. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang terstruktur, sehingga memungkinkan peneliti untuk melihat hubungan antar kategori, pola ketimpangan, serta faktor-faktor yang memengaruhi akses pendidikan di lokasi penelitian.

Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses interpretasi terhadap data yang telah disajikan untuk memperoleh makna substantif dari temuan penelitian. Kesimpulan yang dihasilkan tidak bersifat final pada awal proses, melainkan terus diverifikasi selama penelitian berlangsung melalui triangulasi sumber dan metode, sehingga diperoleh temuan yang valid, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, penggunaan model Miles dan Huberman ini memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam memahami dinamika ketimpangan akses pendidikan Islam di lokasi penelitian.

Hasil dan Diskusi

Hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan lima responden yang terdiri dari orang tua siswa, peserta didik, tokoh masyarakat, serta pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan akses pendidikan di Dusun Tambing Kekeq, Desa Aik Berik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan akses pendidikan Islam merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor geografis, ekonomi, infrastruktur, serta keterbatasan

kebijakan afirmatif pendidikan di wilayah terpencil. Responden pertama, seorang orang tua siswa, mengungkapkan bahwa akses menuju lembaga pendidikan Islam seperti MTs dan MA sangat sulit dijangkau karena jarak yang cukup jauh serta kondisi jalan yang tidak memadai. Ia menuturkan bahwa anak-anak harus menempuh perjalanan panjang dengan medan yang berat, terutama saat musim hujan, sehingga sering kali menyebabkan ketidakhadiran siswa di sekolah. Kondisi ini secara langsung berdampak pada keberlanjutan pendidikan anak-anak di wilayah tersebut.

Responden kedua, seorang siswa tingkat MTs, memperkuat pernyataan tersebut dengan menggambarkan pengalaman sehari-hari dalam menempuh pendidikan. Ia menyatakan bahwa rasa lelah akibat perjalanan jauh sering kali menurunkan motivasi belajar, bahkan beberapa teman sebayanya memilih untuk berhenti sekolah karena tidak mampu menghadapi tantangan akses tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan akses tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga berdampak psikologis terhadap peserta didik.

Responden ketiga, seorang tokoh masyarakat setempat, menyoroti bahwa ketimpangan pendidikan di Dusun Tambing Kekeq telah berlangsung cukup lama dan belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pihak terkait. Ia menegaskan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan di wilayah tersebut masih sangat terbatas, sehingga masyarakat harus bergantung pada lembaga pendidikan yang berada di pusat desa dengan jarak yang relatif jauh. Menurutnya, kondisi ini menciptakan kesenjangan kesempatan pendidikan antara masyarakat di pusat desa dan masyarakat di wilayah pegunungan.

Responden keempat, seorang guru yang bertugas di wilayah sekitar, menjelaskan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan turut memperburuk kondisi tersebut. Ia mengungkapkan bahwa tidak semua siswa dapat mengikuti pembelajaran secara optimal karena faktor kehadiran yang tidak stabil. Selain itu, minimnya dukungan transportasi pendidikan menyebabkan proses pembelajaran sering tidak berjalan efektif, terutama bagi siswa yang berasal dari wilayah terpencil seperti Tambing Kekeq.

Responden kelima, yang merupakan perangkat desa, memberikan perspektif kebijakan dengan menyatakan bahwa pemerintah desa telah berupaya memperjuangkan pemerataan akses pendidikan, namun masih terkendala oleh keterbatasan anggaran serta kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau. Ia menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan khusus yang secara langsung mengatasi masalah akses pendidikan Islam di dusun tersebut, sehingga masyarakat masih menghadapi kesulitan yang

sama dari waktu ke waktu. Hasil wawancara dengan kelima responden tersebut menunjukkan adanya pola ketimpangan akses pendidikan Islam yang konsisten di Dusun Tambing Kekeq. Ketimpangan tersebut tercermin dalam tiga aspek utama, yaitu keterbatasan akses geografis, rendahnya keberlanjutan partisipasi pendidikan siswa, serta minimnya dukungan kebijakan dan infrastruktur pendidikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa permasalahan akses pendidikan tidak dapat dipandang hanya sebagai isu individu, melainkan sebagai persoalan struktural yang membutuhkan intervensi kebijakan yang lebih komprehensif dan berkeadilan.

Ketimpangan akses pendidikan Islam di Dusun Tambing Kekeq, Desa Aik Berik, secara konseptual menunjukkan bahwa pendidikan tidak dapat dipahami semata sebagai layanan sosial, melainkan sebagai arena produksi ketidaksetaraan yang dibentuk oleh konfigurasi ruang, ekonomi, dan kebijakan (Judijanto, L., et al., 2025; Djufri, I., & ST, M., 2026). Dalam perspektif sosiologi pendidikan, kondisi ini merefleksikan mekanisme structural disadvantage yang bekerja secara sistemik melalui keterbatasan akses fisik, ketimpangan distribusi sumber daya, serta lemahnya intervensi afirmatif negara. Dengan demikian, pendidikan dalam konteks ini tidak hanya mencerminkan fungsi inklusif, tetapi juga memperlihatkan bagaimana struktur sosial tertentu dapat melanggengkan eksklusi terhadap kelompok masyarakat di wilayah perifer.

Jika ditinjau dari aspek geografis, temuan penelitian menegaskan bahwa kondisi topografi berbukit dengan akses jalan yang terbatas secara signifikan membentuk hambatan utama dalam mobilitas pendidikan (Wasino, W. et al., 2026; Yusuf, H., & Rahmat, N. 2020; Fadiah, F., 2023). Jarak tempuh yang relatif jauh serta kondisi infrastruktur yang rentan terhadap gangguan musiman seperti hujan dan longsor kecil menciptakan situasi ketidakstabilan akses yang bersifat kronis. Dalam perspektif geografi pendidikan, situasi ini dapat dikategorikan sebagai spatial inequality, yaitu ketimpangan yang lahir dari distribusi ruang yang tidak adil. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada keterlambatan atau ketidakhadiran siswa, tetapi juga menghasilkan kelelahan fisik yang pada akhirnya menurunkan kapasitas konsentrasi dan keterlibatan belajar di ruang kelas, sehingga kualitas pendidikan menjadi terdampak secara langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya, ketimpangan akses pendidikan semakin diperkuat oleh keterbatasan sumber daya manusia pendidikan dan fasilitas lokal. Ketiadaan lembaga pendidikan formal di tingkat dusun serta dominasi pendidikan non-formal menunjukkan adanya disparitas kualitas pendidikan yang cukup signifikan

antara wilayah pusat dan pinggiran. Dalam kerangka teori distribusi pendidikan, kondisi ini mencerminkan *unequal resource allocation*, di mana tenaga pendidik berkualifikasi cenderung terkonsentrasi di wilayah yang lebih mudah dijangkau. Penelitian Pattinasarany, E. R. I. (2012) menegaskan bahwa rendahnya insentif dan keterbatasan infrastruktur menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya minat tenaga pendidik untuk ditempatkan di wilayah terpencil, sehingga kualitas pembelajaran di daerah seperti Tambing Kekeq cenderung bersifat repetitif dan kurang berkembang secara pedagogis.

Selain faktor struktural tersebut, dimensi ekonomi masyarakat juga menjadi determinan penting dalam menjelaskan ketimpangan akses pendidikan Islam. Struktur ekonomi agraris yang bergantung pada hasil alam dengan pendapatan tidak stabil menciptakan kondisi *economic vulnerability* yang tinggi (Fatmawati, I. 2026). Dalam situasi ini, biaya transportasi dan kebutuhan pendidikan sering kali diposisikan sebagai beban tambahan yang bersaing dengan kebutuhan dasar rumah tangga. Sebagaimana dikemukakan Djufri, I., & ST, M (2026), kondisi ini mendorong munculnya dilema rasional di tingkat keluarga, di mana pendidikan tidak selalu diprioritaskan karena tekanan kebutuhan ekonomi jangka pendek. Akibatnya, keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan pendidikan anak sering kali ditentukan oleh pertimbangan ekonomi, bukan oleh orientasi jangka panjang terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Akumulasi dari hambatan geografis, ekonomi, dan kelembagaan tersebut berdampak pada munculnya kesenjangan kognitif dan literasi keagamaan antara wilayah pusat dan pinggiran. Dalam perspektif *knowledge gap theory*, perbedaan akses terhadap sumber informasi dan fasilitas pendidikan akan menghasilkan disparitas dalam tingkat pemahaman dan kemampuan analitis individu (Ledyawati, L., et al., 2025). Anak-anak yang berada di wilayah pusat memiliki akses terhadap sumber belajar yang lebih variatif seperti perpustakaan dan teknologi digital, sementara anak-anak di Tambing Kekeq cenderung terbatas pada pembelajaran konvensional yang bersifat praktis. Khairifa, F. (2025) menegaskan bahwa kondisi ini berpotensi melahirkan pemahaman keagamaan yang kurang komprehensif, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas literasi keislaman masyarakat secara keseluruhan.

Keseluruhan temuan dan penguatan data menunjukkan bahwa ketimpangan akses pendidikan Islam di Dusun Tambing Kekeq merupakan hasil interaksi kompleks antara keterisolasi geografis, ketimpangan distribusi tenaga pendidik, keterbatasan ekonomi masyarakat, serta disparitas literasi pendidikan. Keempat aspek tersebut saling menguatkan

dan membentuk suatu siklus ketidaksetaraan yang bersifat struktural dan berkelanjutan. Oleh karena itu, permasalahan ini tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan parsial, melainkan membutuhkan intervensi kebijakan yang terintegrasi, berbasis wilayah, serta mempertimbangkan karakteristik sosial dan geografis lokal secara mendalam.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketimpangan akses pendidikan Islam di Dusun Tambing Kekeq, Desa Aik Berik merupakan fenomena multidimensional yang berakar pada interaksi kompleks antara isolasi geografis, keterbatasan infrastruktur pendidikan, kondisi ekonomi agraris masyarakat, serta belum optimalnya kebijakan afirmatif pendidikan di wilayah terpencil. Kondisi topografis yang sulit dijangkau tidak hanya membatasi mobilitas fisik peserta didik, tetapi juga berimplikasi pada rendahnya keberlanjutan partisipasi pendidikan dan melemahnya kualitas keterlibatan belajar. Pada saat yang sama, distribusi tenaga pendidik yang tidak merata serta terbatasnya fasilitas pendidikan formal memperkuat disparitas kualitas pembelajaran antara wilayah pusat dan pinggiran. Faktor ekonomi masyarakat yang rentan semakin mempersempit ruang pilihan pendidikan, sehingga pendidikan sering kali diposisikan sebagai beban dibandingkan investasi jangka panjang. Akumulasi dari seluruh kondisi tersebut pada akhirnya melahirkan kesenjangan literasi keagamaan yang signifikan, yang berpotensi memengaruhi kualitas pemahaman keislaman masyarakat secara lebih luas. Dengan demikian, ketimpangan akses pendidikan Islam di wilayah ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan manifestasi dari ketidakadilan struktural yang bersifat sistemik, sehingga menuntut intervensi kebijakan yang holistik, berkeadilan spasial, dan berorientasi pada pemerataan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan artikel ini. Segala bantuan, bimbingan, serta masukan yang telah diberikan sangat berharga bagi penyempurnaan penelitian ini hingga selesai dengan baik.

Referensi

Angglepi, M. S., Susanti, E., & Haironi, N. (2025). Tantangan mobilitas pelajar di sebrang Sungai Kampar Kiri dalam menempuh pendidikan.

- Journal Education, Sociology and Law, 1(1), 757-764.
- Arinda, M. (2025). Resiliensi sosial masyarakat Desa Alue Keujrun dalam menghadapi keterbatasan akses pendidikan menengah (Disertasi Doktor, Universitas Malikussaleh).
- Djufri, I., & ST, M. (2026). Aksesibilitas perkotaan dan IPM: Membaca pembangunan dari perjalanan harian. Feniks Muda Sejahtera.
- Djufri, I., & ST, M. (2026). Merancang kota, memahami manusia: Pendekatan antropologi dalam penataan wilayah. Feniks Muda Sejahtera.
- Fadiah, F. (2023). Co-production pelayanan publik (Studi: ShelterWarga Kota Makassar) = Co-production of public service (Study: Community Shelter of Makassar City) (Disertasi Doktor, Universitas Hasanuddin).
- Fatmawati, I. (2026). Ketimpangan akses pendidikan agama dan implikasinya terhadap mobilitas sosial: (Analisis perspektif teori konflik). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 5971-5980.
- Gunawan, B. (2020). Analisis yuridis pendidikan jarak jauh dalam perspektif hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia. *Jurnal HAM*, 11(3), 387.
- Hamidi, J. (2016). Perlindungan hukum terhadap disabilitas dalam memenuhi hak mendapatkan pendidikan dan pekerjaan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(4), 652-671.
- Hasanah, R. (2025). Ketimpangan akses pendidikan di daerah terpencil: Isu ham dan kebijakan hukum di indonesia. *Wicarana*, 4(1), 1-9.
- Judijanto, L., Atmaja, U., Irawati, I., Juhandi, D., Kusumastuti, S. Y., & Chaniago, N. (2025). Ekonomi pembangunan pedesaan. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ledyawati, L., Wirautami, N. L. P., Syafruddin, S., Watie, E. D. S., Setyowati, R. M., Pujiriyani, D. W., ... & Khairifa, F. (2025). Dilematika perempuan: Mengkaji permasalahan sosial yang dihadapi perempuan Indonesia. Star Digital Publishing.
- Mustika, W., Arrang, A. T., Londongsalu, J., Wulansari, I., Ahmad, S. N., Syukuriah, S., ... & Kusuma, A. (t.th.). Infrastruktur transportasi untuk kota kecil.
- Pattinasarany, E. R. I. (2012). Mobilitas sosial vertikal antar generasi: Kajian terhadap masyarakat kota di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Universitas Indonesia.
- Prima, J., & Wahyunisa, H. (2025). Tinjauan yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 tentang hak pendidikan anak di Indonesia. *Sanskara Hukum dan HAM*, 4(02), 146-154.
- Ramadhani, D. A., Meidiah, A. N. S., Ramadani, N. O., Yusuf, M., Zulihi, Z., Taslim, M., & Efendy, D. (2025). Keterbatasan transportasi dan kendala anak sekolah dalam mengakses pendidikan di Kampung Pisang Kota Jayapura. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 5(2), 681-692.
- Rini, N. S. (2018). Analisis implementasi prinsip non-diskriminasi dalam peraturan daerah di bidang pendidikan dan kesehatan. *Jurnal HAM*, 9(1), 19-36.
- Rohmah, A. R. K. A., Qonitatun, A., Luwistiana, S. N., & Yuniasih, Z. K. (2026). Kesenjangan kualitas sekolah: Tantangan pemerataan pendidikan dasar di pesisiran Jawa dan implikasinya di ranah keberagaman Islam. *Al Madjid: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 1-29.
- Seo, M. R., Pairikas, F., & Saingo, Y. A. (2025). Potret diskriminasi agama di Indonesia: Studi kasus implementasi nilai keadilan sosial bagi kelompok minoritas. *Mutiara: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 3(1), 319-338.
- Siregar, S. H., Refdianti, A., Harahap, E. T. H., Telaumbanua, P. A. H., & Sirregar, S. B. (2025). Analisis hambatan akademis dan infrastruktur dalam mewujudkan cita-cita pendidikan di Desa Tamosu, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Islamic and Scientific Education Research, 2(3), 82-93.
- Wasino, W., Barokah, A., Maulida, L. R., & Ismuwardani, Z. (2026). Jejak Sosial: Menyingkap Ketimpangan dan Keadilan di Tengah Masyarakat. CV Eureka Media Aksara.
- Yusuf, H., & Rahmat, N. *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT COOPARATIVE FARMING Masyarakat Petani Padi di Lahan Gambut*.